

## UJIAN NASIONAL DALAM TINJAUAN KRITIS FILSAFAT PENDIDIKAN PRAGMATISME

Oleh: Sumasno Hadi

(Dosen PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin)

### Abstrak

Tulisan ini adalah sebuah kajian analitis terhadap aliran pemikiran filsafat pendidikan pragmatisme. Analisis tersebut digunakan untuk melakukan tinjauan kritis atas konsep dan pelaksanaan Ujian Nasional dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jenis kajian ini adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode analisis yang dipakai adalah hermeneutika dan interpretasi sebagai metode yang menekankan pada perumusan makna. Hasil kajian ini menyatakan bahwa filsafat pendidikan pragmatisme adalah konsep pendidikan yang didasarkan pada pengakuan akan perubahan, proses, relativitas dan rekonstruksi pengalaman peserta didik sebagai manusia. Dalam tinjauan filsafat pendidikan pragmatisme, sistem Ujian Nasional perlu dikaji ulang sebab pelaksanaan Ujian Nasional tidak menjamin para peserta didik untuk menempatkan pengetahuannya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Pendidikan pragmatisme juga memandang evaluasi belajar bukan hanya diperoleh melalui sistem Ujian Nasional yang dominan menilai aspek kognitif saja. Paradigma pendidikan pragmatisme melihat sistem Ujian Nasional kurang tepat untuk diterapkan dalam sistem evaluasi pendidikan di Indonesia karena hanya melibatkan sisi formalitas pendidikan belaka, tidak menyentuh hasil penilaian yang lebih bermakna seperti pengalaman dan keterampilan dalam memecahkan masalah.

**Kata kunci:** *Ujian Nasional, Pragmatisme, Filsafat Pendidikan.*

### Abstract

This paper is an analytical study of the educational philosophy of pragmatism school of thought. The analysis is used to perform a critical review of the concept and implementation of the *Ujian Nasional* in the education system in Indonesia. This type of study is a literature review using descriptive qualitative approach. The analytical methods used are hermeneutics and interpretation as a method that emphasizes the formulation of meaning. The results of this study stated that the educational philosophy of pragmatism is the concept of education based on the recognition of the change, processes, relativity and reconstruction of the learner as a human experience. In a review of the educational philosophy of pragmatism, the *Ujian Nasional* system needs to be re-examined since the implementation of the *Ujian Nasional* does not guarantee the students to put their knowledge to solve the problems it faces. Education pragmatism also looked at the evaluation of learning not only obtained through the *Ujian Nasional* dominant system assesses cognitive aspects. Educational paradigm of pragmatism see National Exam system to be applicable in a less precise evaluation of the

education system in Indonesia because it involves only the mere formality of education, do not touch the assessment results are more meaningful as the experience and skill in solving problems.

**Keywords:** *Ujian Nasional, Pragmatism, Philosophy of Education.*

## **Pendahuluan**

Pragmatisme, sebagai diskursus pemikiran kritis adalah pemikiran filsafati yang pada mulanya berkembang di Barat, tepatnya di Amerika. Sesuai dengan namanya, filsafat pendidikan pragmatisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan berdasarkan pandangan filsafat pragmatisme. Pragmatisme juga sering disejajarkan dengan progresivisme, instrumentalisme, eksperimentalisme dan environmentalisme (Noor Syam, 1983:228). Salah satu tokoh utama dari aliran ini adalah John Dewey. Ia menganggap bahwa pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perubahan, proses, relativitas, dan rekonstruksi pada pengalaman manusia (Ornstein dan Levine, 1985:199). Sesuai dengan corak filsafat yang mendasarinya, aliran pragmatisme pendidikan memiliki ciri dan karakter yang berbeda dengan beberapa aliran pemikiran tradisional seperti idealisme, realisme, perennialisme dan esensialisme. Perbedaan ini muncul karena aliran pragmatisme memang mendasarkan pada landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang sangat berbeda.

Ketika mengkaji persoalan filsafat pendidikan maka tidak bisa dihindari bahwa pembahasannya akan berangkat dari filsafat

sebagai bidang ilmu sebagai titik tolaknya. Dalam kajian filsafat pendidikan diandaikan penggunaan suatu cara kerja filsafat dan hasil-hasil metode filsafat berupa pemikiran tentang realitas, pengetahuan dan nilai. Filsafat pendidikan, sesuai dengan posisi ilmunya merupakan landasan filsafati yang menjiwai seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan dalam pendidikan (Noor Syam, 1983:39). Karena filsafat pendidikan merupakan turunan dan terapan dari ilmu filsafat, di mana bidang filsafat memiliki beraneka ragam aliran pemikirannya, maka dalam kajian filsafat pendidikan pun akan disertakan pula tinjauan berbagai aliran pemikiran, sekurang-kurangnya sebanyak aliran filsafat itu sendiri.

Tulisan ini mencoba menganalisis salah satu aliran pemikiran dalam filsafat pendidikan, yaitu pragmatisme. Analisis tersebut digunakan untuk meninjau secara kritis konsep dan pelaksanaan Ujian Nasional dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian dalam tulisan ini adalah kualitatif-deskriptif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yang menekankan pada perumusan makna, yakni: hermeneutika dan interpreteasi. Hasil analisis yang dipakai sebagai tinjauan kritis persoalan Ujian Nasional disimpulkan dan ditampilkan

secara deskriptif. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan satu perspektif untuk melihat kembali secara kritis problematika pendidikan di Indonesia, khususnya konsep dan pelaksanaan Ujian Nasional.

### **Landasan Ontologis Pragmatisme**

Ontologi sebagai bidang pemikiran kritis mengenai hakikat realitas merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam pemikiran filsafat, khususnya mengenai hakikat manusia dalam pendidikan. Hal ini menjadi penting jika dikaitkan dengan kajian mengenai pendidikan, di mana yang menjadi subjek dan objeknya adalah manusia. Artinya untuk mengetahui pendidikan ideal seperti apa yang tepat untuk diterapkan pada seseorang, maka perlu dikaji terlebih dahulu hal-hal mendasar atau filsafati mengenai manusia yang menjadi objek dan subjek pendidikan tersebut.

Ontologi adalah bidang filsafat yang berurusan dengan pertanyaan mengenai struktur dasar realitas. Kaitannya dengan asumsi ontologis ini, sebagaimana disebutkan oleh Ornstein dan Levine (dalam Mudyahardjo, 1995:199), pemikiran pragmatisme pendidikan memiliki kata-kata kunci dalam hal pemikiran atau landasan ontologis yaitu: *proses, perubahan, interaksi* dan *pengalaman*. Dalam pandangan pragmatisme, kenyataan atau realitas dipahami memiliki dua entitas yaitu individual dan lingkungan. Entitas individual, maksudnya adalah manusia secara personal, sedangkan entitas lingkungan berarti lingkungan sosial

sekaligus lingkungan alam. Inti dari landasan ontologis aliran pragmatisme adalah bahwa realitas pada dasarnya merupakan suatu interaksi antara individu dengan lingkungan atau pengalamannya. Oleh karena interaksi ini berlangsung secara terus menerus dan pengalaman juga berkembang seiring dengan semakin lamanya hidup yang dijalani manusia, maka realitas dalam pemahaman pragmatisme dipahami sebagai sesuatu yang selalu berubah. Itulah pandangan pragmatisme mengenai realitas yang kemudian dijadikan sebagai landasan ontologis dari sistem pendidikan yang dikembangkan.

Asumsi ontologis mengenai realitas ini kemudian mempengaruhi aspek pokok dalam filsafat pendidikan pragmatisme, terutama dalam hal kurikulum pendidikannya. Oleh karena realitas dipahami terus berada dalam proses atau perubahan, maka kurikulum yang baik menurut pragmatisme pendidikan adalah kurikulum yang sesuai dengan aspek perubahan tersebut. Kesesuaian itu lebih didasarkan pada sisi keilmiahannya. Prinsip kesesuaian ini menjadi sangat penting dalam pandangan ontologis pragmatisme, karena hidup manusia selalu dimaknai sebagai interaksi antara individual dengan lingkungannya. Hidup merupakan pengalaman, dan di dalamnya selalu ada pengalaman-pengalaman baru. Pengalaman yang dijalani oleh manusia selalu berbeda sehingga selalu dituntut adanya kesesuaian antara individu dengan lingkungan atau pengalaman yang

dihadapi (Mudyahardjo, 1995:200). Pandangan inilah yang mempengaruhi asumsi-asumsi filsafati lainnya dalam aliran pragmatisme pendidikan.

### **Landasan Epistemologis Pragmatisme**

Satu hal yang pertama-tama harus digarisbawahi sebelum membahas lebih jauh tentang pragmatisme adalah bahwa pragmatisme lebih dekat dengan pengertian filsafat bertindak atau lebih berarti praktis. Dalam menghadapi berbagai persoalan baik psikologis, metafisika, epistemologis dan aksiologis, pragmatisme pada akhirnya selalu akan mempertanyakan bagaimana konsekuensi praktisnya? Setiap pemecahan atas masalah apapun selalu dilihat dalam kerangka konsekuensi praktisnya yang dikaitkan dengan kegunaannya dalam kehidupan manusia. Artinya konsekuensi praktis yang berguna dan memuaskan manusia dalam hali ini yang membenarkan sebuah tindakan.

Di dalam kerangka pikiran tersebut, kaum pragmatisme tidak mau berargumentasi secara bertele-tele bahkan sama sekali tidak menghendaki adanya diskusi, melainkan langsung mencari tindakan yang paling tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat. Kaum pragmatisme adalah manusia-manusia empiris yang sanggup bertindak yang tidak terjerumus dalam pertengkaran ideologis, melainkan secara nyata berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan tindakan yang konkret. Manusia pragmatis jika berhadapan dengan fenomena kebakaran misalnya, tidak

akan berdebat secara panjang lebar tentang cara menanggulangi kebakaran, melainkan segera memanggil petugas pemadam kebakaran kemudian berusaha memadamkan api itu. Manusia pragmatis cukup manusiawi karena tidak melupakan kebutuhan nyata orang-orang untuk berilmu dan berpengetahuan. Oleh karena itu pragmatisme menginterpretasikan ilmu pengetahuan terutama sebagai metode atau cara memperlakukan sesuatu. Dan ini mempunyai peran sentral dalam cara berpikir filsafat pragmatisme.

Ilmu pengetahuan bagi kaum pragmatis terutama diinterpretasikan sebagai metode karena mereka berpandangan bahwa pemikiran merupakan proses atau sarana untuk membakukan keyakinan demi tindakan manusia. Suatu ide atau gagasan tidak mempunyai tujuan pada dirinya sendiri karena ide dan gagasan itu merupakan sarana untuk bertindak. Sebaliknya, suatu tindakan hanya mungkin dilakukan kalau ada keyakinan akan kebenaran ide atau gagasan yang menjadi sarana tindakan tersebut. Karena itu dalam bertindak, kebenaran ide akan selalu diverifikasi. Daya pengetahuan dipandang sebagai sarana bagi tindakan. Dengan demikian pertanyaan mendasar yang menentukan sebagai pertanyaan khas pragmatisme adalah: apa gunanya pengetahuan bagi kehidupan?

Pragmatisme pendidikan mengajarkan bahwa yang penting adalah pengaruh apa yang

dimiliki suatu ide dalam suatu rencana tindakan, dan bukan apa hakikat ide itu. Pengetahuan mengenai sesuatu tidak lain adalah gambaran yang diperoleh mengenai akibat yang akan disaksikan. Arti pengertian-pengertian tertentu hanya dapat ditentukan bukan dengan menanyakan benar tidaknya pengertian tersebut dari sudut teori ilmu pengetahuan, melainkan dengan menggunakan ukuran tindakan dan sifat-sifat umum apa sehingga diterima suatu pengertian. Nilai suatu pengertian tergantung pada penerapannya yang nyata dalam masyarakat. Pengetahuan manusia dikatakan benar karena memantulkan atau menciptakan kenyataan, dan bila ia dapat membuktikan manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat umum (Peursen, 1980:34).

John Dewey (2002:55—57) menganjurkan bahwa yang penting dalam pengetahuan bukanlah masalah abstrak mengenai benar tidaknya, melainkan sejauh mana manusia dapat memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat manusia dan dalam kenyataan hidup. Seperti halnya pendapat pemikir pragmatisme lainnya, Charles S. Peirce, bagi Dewey pun kegunaan umum tetap menjadi kriteria utama, sedangkan daya pikir atau daya tahu hanya merupakan sarana belaka. Artinya bukan konsep-konsep itu sendirilah yang benar dan penting, melainkan ide-ide itu menjadi benar dan penting dalam rangka proses penggunaannya. Pengetahuan itu bersifat dinamis, karena harus

sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang silih berganti dan yang memantulkan hakekat dunia (Peursen, 1980:35). William James, pemikir pragmatisme pendahulu Dewey, sejalan dengan pandangan-pandangan di atas, khususnya pandangan Peirce. Ia juga mengukur kadar kebenaran suatu pengetahuan atau ide berdasarkan akibat praktisnya. Tetapi berbeda dengan Peirce, menurut James kriteria kebenaran terutama hendaknya dicari dalam taraf seberapa jauh kita secara pribadi dan psikis merasa puas terhadap akibat praktis dari idea atau pengetahuan tersebut (Peursen, 1980:34).

Berdasarkan pendapat tiga tokoh utama pragmatisme di atas, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi pragmatisme melibatkan individu, organisme, dan lingkungan. Individu berinteraksi dengan lingkungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Interaksi ini dapat mengubah lingkungan atau bahkan mengubah individu. Pengetahuan adalah transaksi antara individu sebagai orang yang belajar dengan lingkungannya. Dasar atas interaksi ini adalah konsep tentang perubahan. Masing-masing interaksi mungkin memiliki beberapa aspek umum atau pengalaman-pengalaman yang dapat ditransfer untuk interaksi berikutnya. Jadi, individu akan berubah dan demikian juga transaksi akan berubah. Kebenaran bagi pragmatisme adalah ketika suatu konsep itu bekerja dan mampu digunakan untuk memecahkan masalah (Ornstein dan Levine,

1985:200).

### **Landasan Aksiologis Pragmatisme**

Secara aksiologis, pragmatisme berpandangan bahwa nilai yang timbul karena kemampuan manusia akan bahasa. Dari bahasa tersebutlah yang membentuk pergaulan antarsesama, menjadi bentuk kelompok dan kemudian menjadi suatu masyarakat. Bahasa sebagai ekspresi dari suatu kehendak dan lainnya akan menimbulkan suatu nilai. Nilai baik, buruk, benar atau salah jika suatu bahasa tersebut berkesesuaian dengan realitas dalam interaksi manusia dengan sesama dan lingkungannya. Jika suatu ilmu pengetahuan tidak berdasar nilai dalam arti tidak ada manfaatnya bagi suatu lingkungan sosial-masyarakat maka dalam pandangan pragmatisme pengetahuan tersebut tidak dianggap benar. Oleh sebab itu, bertendensi pada nilai relevansi dengan kehidupan faktual merupakan prasyarat mutlak bagi filsafat pragmatisme agar pengetahuan tersebut dianggap benar.

Konsepsi nilai-nilai aksiologi dalam pandangan pragmatisme ini lebih menekankan terhadap kondisi situasional, tergantung pada kebutuhan dalam pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dalam pandangan kaum pragmatisme itu sangat relatif sekali sesuai tempat, waktu dan keadaan (Ornstein dan Levine, 1985:200). Karena itu pendidikan pragmatis, tak lain adalah pendidikan yang lebih mengedepankan pada sisi eksternal, dalam artian nilai pengetahuan juga bisa

diambil dari interaksi dengan yang lain dan bahkan melalui keterampilan seperti kursus otomotif, kursus menjahit dan kursus bengkel motor. Pendidikan keterampilan inilah yang sesungguhnya mempunyai kegunaan bagi manusia. Dengan begitu, pendidikan yang menggunakan paradigma pragmatisme juga memiliki kontribusi pada manusia dan perkembangan mengenai nilai, terutama ketika manusia dalam perkembangannya dibatasi oleh berbagai hal.

### **Konsep Pendidikan Filsafat Pragmatisme**

Sebagaimana disinggung sebelumnya di atas, pragmatisme pendidikan didasarkan pada perubahan, proses, relativitas dan rekonstruksi pengalaman manusia. Dewey menekankan metodologi yang berhubungan dengan proses pemecahan masalah. Belajar berarti seseorang terlibat di dalam pemecahan masalah. Dalam epistemologi eksperimental Dewey, ia menyarankan bahwa siswa baik individu maupun kelompok sebaiknya menggunakan metode-metode ilmu untuk memecahkan masalah pribadi maupun sosial (Dewey, 2002:44—49). Masalah-masalah ini bervariasi dalam menanggapi keadaan lingkungan yang terus berubah. Tujuan yang penting di sini adalah bahwa peserta didik akan mendapatkan metode atau proses pemecahan masalah secara cerdas. Guru tidak berusaha untuk mendominasi proses belajar tetapi berusaha untuk memandu dengan bertindak sebagai direktur atau fasilitator penelitian yang dikerjakan oleh siswanya.

Pragmatisme melihat sekolah sebagai suatu lingkungan khusus yang merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih umum. Dalam konsep pragmatisme pendidikan, tidak ada pemisahan antara sekolah dan masyarakat. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat bertugas untuk menyederhanakan unsur-unsur budaya yang menjadi kebutuhan individu untuk selanjutnya berpartisipasi dalam masyarakat. Sebagai suatu lingkungan khusus, sekolah sengaja membawa siswa untuk berpartisipasi dalam budaya. Di sini, sekolah memiliki tiga fungsi yaitu menyederhanakan, memurnikan dan menyeimbangkan warisan budaya dalam masyarakatnya. Menyederhanakan berarti sekolah memilih unsur-unsur dari warisan budaya. Maksudnya, sekolah menyeleksi mana saja dari unsur-unsur warisan budaya yang dapat dijadikan unit-unit yang tepat untuk dipelajari. Memurnikan berarti sekolah memilih elemen warisan budaya yang pantas dan menyingkirkan yang tidak pantas, yaitu yang membatasi interaksi dan pertumbuhan manusia. Menyeimbangkan berarti sekolah mengintegrasikan pengalaman yang telah dipilih dan dimurnikan tadi ke dalam sebuah harmoni sehingga mencapai keseimbangan dalam tatanan masyarakat.

Pragmatisme mengakui akan adanya kemajemukan dalam suatu kelompok masyarakat, untuk itu sekolah sudah seharusnya membantu siswa dari kelompok yang satu untuk memahami kelompok yang

lain. Sebagai komunitas belajar yang terintegrasi secara murni dan demokratis, sekolah harus terbuka untuk semua. Dewey (2002:50—57), secara khusus menganjurkan masyarakat untuk terbuka dan berbagi karena persoalan kualitas dan kesetaraan bukanlah sesuatu yang saling menyisihkan satu dengan yang lain. Suatu masyarakat dan sistem pendidikan akan mencapai puncak kesuksesan ketika mereka bersedia untuk berbagi seluas mungkin sumber daya di antara semua orang di dalam masyarakat. Berbagi tidak akan mengurangi kualitas tapi malah akan memperkaya. Dalam istilah Dewey, kualitas dan ekuitas timbal balik dalam berhubungan sosial dan pendidikan adalah "barang" untuk digunakan bersama oleh semua.

Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen/tindak percobaan serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Pragmatisme juga bisa dimaknai sebagai kecenderungan untuk mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Istilah Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani "pragma" yang berarti perbuatan (*action*) atau tindakan (*practice*). Kata "isme" sendiri berarti ajaran atau paham pemikiran. Dengan demikian Pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menurut tindakan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-

akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu.

Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsuf di dalam sejarah pemikiran filsafat.

Kemunculan pragmatisme sebagai aliran filsafat dalam kehidupan kontemporer khususnya di Amerika telah membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pragmatisme telah berhasil membumikan filsafat dari sifat yang cenderung berfikir metafisis, idealis, abstrak dan intelektualis. Pragmatisme cenderung berfikir tentang hal-hal yang mempersoalkan kenyataan, material dan atas kebutuhan-kebutuhan dunia. Dengan demikian, filsafat pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekedar mempercayai

pada hal yang sifatnya riil, indriawi dan yang memanfaatkannya bisa di nikmati secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Pragmatisme telah berhasil mendorong berfikir secara liberal, bebas dan selalu menyangsikan segala yang ada. Dari sikap skeptis tersebut pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian-penelitian, pembuktian-pembuktian dan eksperimen-eksperimen sehingga muncullah temuan-temuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan yang mampu mendorong kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Karena pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut dan hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara alamiah, maka secara tidak langsung pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang bersifat transendental. Kemudian pada perkembangan lanjut, pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan, maka sikap-sikap semacam ini rentan menjurus kepada ateisme. Karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis dan langsung dapat di nikmati hasilnya oleh manusia maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis.

Implikasi pandangan filsafat pragmatisme terhadap pendidikan adalah,



bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan-tujuan pendidikan pragmatisme meliputi kesehatan yang baik, keterampilan-keterampilan kejuruan, minat-minat untuk kehidupan yang menyenangkan, persiapan untuk menjadi orangtua, serta kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Pragmatisme juga menganjurkan pendidikan yang harus meliputi pemahaman tentang pentingnya demokrasi. Menurut pragmatisme, pendidikan hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan/memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

Dalam pandangan Pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Karena itu masalah-masalah masyarakat demokratis harus menjadi bentuk dasar kurikulum; dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokratis juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu kurikulum harus berbasis pada masyarakat, praktik cita-cita demokratis pada setiap tingkat pendidik, berisi batasan tujuan-tujuan dan nilai-nilai umum dalam masyarakat, bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru, dan pastinya kurikulum berpusat pada siswa

Metode pendidikan pragmatisme mengutamakan penggunaan metode

pemecahan masalah (*problem solving method*) serta metode penyelidikan dan penemuan (*inquiry and discovery method*). Peran guru dan siswa dalam filsafat pragmatisme ini menekankan, bahwa belajar selalu dipertimbangkan untuk mendidik siswa menjadi seorang individu yang mandiri. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya pada siswa. Untuk membantu siswa guru harus berperan menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi, membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah yang dihadapi mereka secara spesifik, membimbing untuk merencanakan tujuan-tujuan individual dan kelompok, membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi, juga bersama-sama kelas mengevaluai apa yang telah dipelajari

### **Tinjauan Kritis atas Ujian Nasional**

Bagaimanapun, pragmatisme sebagai sebuah aliran pemikiran kritis di bidang pendidikan jelas memiliki beberapa kelebihanannya. Paradigma di dalam pendidikan pragmatisme ini bisa dikatakan memiliki relevansi dengan pemahaman awam mengenai pendidikan di Indonesia karena banyak orang tua yang mengharapkan setelah selesai sekolah anak-anak mereka mendapatkan kerja yang lebih. Karena itu pendidikan pragmatisme, yakni seperti halnya penerapannya pada sekolah-sekolah yang mengedepankan nilai kejujuran, memberikan salah satu tawaran

solutif.

Pragmatisme mengarah pada pengembangan aspek pengajaran pada tindakan dan perilaku manusia agar dalam masalah mengambil keputusan moral dalam tindakan menjadi tepat dan sesuai dengan pengetahuan yang di dapat di sekolah. Nilai kebaikan dalam dunia pendidikan harus ditonjolkan, sehingga siswa tidak hanya menekankan pandangan yang berguna untuk kepentingannya terutama dalam dunia kerja.

Dalam konteks Ujian Nasional (selanjutnya ditulis UN) sebagai sistem evaluasi pendidikan nasional pada tingkat dasar hingga menengah, pelaksanaannya kerap terbentur pada persoalan-persoalan minimnya kesiapan lembaga pendidikan beserta rendahnya kualitas proses pembelajarannya, dan persoalan ketidakmerataan perhatian pemerintah pusat kepada daerah. Sentralitas yang dapat dijadikan sifat model evaluasi UN memang sangat rasional untuk mengukur kualitas pendidikan nasional yang memiliki standar tertentu. Namun demikian, satu persoalan yang kerap dikritik oleh para ahli pendidikan adalah pada soal dijadikannya hasil UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Berikut beberapa persoalan lainnya terkait pelaksanaan UN.

Pada hasil suatu hasil penelitian dalam Jurnal *Edukasi* Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi (Aisah dan Rofieq, 2011:77), terungkap bahwa UN hanya mengevaluasi

aspek kognitif belaka, butir-butir soal dalam UN hanya menuntut daya ingat siswa terhadap fakta-fakta keilmuan yang angurkan di kelas oleh guru, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik tidak diukur. Hal ini menjelaskan bahwa UN tidak sesuai dengan model kurikulum yang tetapkan pemerintah sendiri yang mengusung tiga aspek dalam dalam ranah pendidikan yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik dan hasil penilaian berbasis kompetensi tidak dilakukan

Konsep dan pelaksanaan UN yang memang sedang menjadi bahan perdebatan kritis itu, lalu ketika UN ini dikaitkan dengan pandangan pragmatisme, terutama pada aspek aksiologi tentunya memiliki kejanggalan dan ketidakbebasan terutama bagi siswa. Saat ini UN dijadikan suatu patokan atau pedoman dalam menentukan prestasi dan kelulusan bagi siswa-siswi. Dari situ, terbukalah pintu kritik dan penolakan berbagai pengamat pendidikan. Jika hal itu dihadapkan pada pandangan pragmatisme yang lebih menekankan pada nilai-nilai yang tergantung pada diri siswa, tentunya disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda. Karena itu, bila semua siswa disamaratakan dalam konteks UN ini, maka pembelajaran menjadi dangat kontradiktif. Hal itu dikarenakan dalam pragmatisme nilai-nilai tertinggi itu terdapat dalam pengalaman manusia sebagai individu dalam menentukan interaksinya sehingga siswa bisa menentukan keputusan setiap masalah sesuai dengan

pengalaman masing-masing dalam memecahkan problem yang dihadapi.

Pendidikan di sekolah hanya sebagai seleksi saja dalam mengambil nilai-nilai pengetahuan yang mungkin bisa diambil untuk kepentingan siswi-siswi sehingga bisa dijadikan metode ilmiah atau sebagai cara dalam memecahkan masalah. Karena itu, menurut aliran pragmatis ini, keberadaan UN perlu dikaji ulang. Sebab, UN tidak menjamin kepada siswa untuk mampu menempatkan nilai-nilai pengetahuan dalam memecahkan problem yang dihadapi siswa. Sehingga yang diperlukan tentunya jangan hanya dinilai dari UN karena di dalam nilai-nilai hanya mengandung aspek kognitif saja, akan tetapi tidak pada aspek motorik. Dengan begitu, paradigma pragmatisme dalam melihat segi nilai terhadap UN kurang tepat. Pada kenyataannya, UN memang hanya berkonsentrasi pada formalitas dalam pendidikan, akan tetapi tidak menyentuh persoalan hasil konkret yang diperoleh lewat pengalaman, keterampilan dalam memecahkan masalah, misalnya pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki potensi memberikan hasil lebih baik dan berguna pada dunia kerja.

### **Simpulan**

Kesimpulan yang menjadi penutup tulisan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Filsafat pendidikan pragmatisme adalah aliran pemikiran pendidikan yang sangat fokus dan

mementingkan kegunaan atau kemanfaatan pendidikan. Namun demikian, porsi kepraktisan yang sangat mendominasi konsep pendidikan pragmatisme itu tetap memperhatikan proses-proses pendidikan yang ilmiah-metodis dengan memprasyaratkan aspek sosial dan kultural. Artinya, tujuan pendidikan harus berdiri di atas konteks kemasyarakatan, dan pendidikan harus memiliki peran untuk membangun peradaban. Selain itu, John Dewey sebagai tokoh penting pendidikan pragmatisme juga menganjurkan pendidikan yang mengarah pada tujuan demokrasi, di mana prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi penting. Lalu, dari beberapa konsep pendidikan pragmatisme tersebut dapat dipakai untuk meninjau kembali UN sebagai evaluasi pendidikan nasional di Indonesia. Hasilnya, UN dipandang terlalu mendahulukan formalisme tanpa mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Acuan standarisasi evaluasi nasional yang dituju pemerintah dalam penyelenggaraan UN tidak sesuai dengan prinsip kualitas dan ekuitas sebagaimana disarankan oleh kalangan pragmatisme. Lalu, aspek: prinsip perubahan, proses dan pengalaman yang menjadi perhatian pendidikan pragmatisme dalam mencapai tujuan pembelajaran tidak sejalan dengan konsep UN yang cenderung bersifat konseptual dan jauh dari pengalaman maupun proses pembelajaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, John. (2002) *Pengalaman dan Pendidikan*. Terjemahan John de Santo dari “*Experience and Education*” (*The Collected Works of John Dewey, Later Works: Volume 13, 1938-1939*). Yogyakarta: Kepel Press.
- C.A. van Peursen. (1980) *Orientasi di Alam Filsafat*. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia.
- Dardiri, Ahmad. (Tanpa tahun) “*Aspek-Aspek Filsafat dan Kaitannya Dengan Pendidikan*”. Diklat Matakuliah Filsafat Pendidikan Program Pascasarjana Ilmu Filsafat: Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.
- Mudyahardjo, R. (1995) *Filsafat Pendidikan (Sebuah Studi Akademik) Bagian I Orientasi Umum: Landasan Filosofis Pendidikan dan Filsafat Pendidikan sebagai Suatu teori Pendidikan*. Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
- Noor Syam, Mohammad. (1983) *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ornstein, Allan C. dan Levine, Daniel U. (1985) *An Introduction to the Foundation of Education*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Maisaroh dan Falah. (2011) “Religiusitas dan Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa Madrasah Aliyah” dalam *Jurnal Psikologi PROYEKSI* Vol. 6 No. 2 Oktober 2011. Universitas Islam Sultan Agung.
- Aisah dan Rofieq. (2011) “Analisis Kebijakan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)” dalam *Jurnal Pascasarjana EDUKASI* Vol. 3 No. 1 Maret 2011. Universitas Islam 45 Bekasi.